



IMPLIKASI PERKEMBANGAN GEOPOLITIK ASEAN TERHADAP KEAMANAN MARITIM INDONESIA

Evi Apriani, Asep Adang Supriyadi, Lukman Yudho Prakoso, Pujo Widodo,

Herlina Risma Juni Saragih, Kristijarso, Panji Suwarno

Keamanan Maritim, Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, Indonesia

Abstrak

Geopolitik adalah kajian tentang dinamika global dan hubungan internasional yang dipengaruhi oleh lokasi suatu negara. Perkembangan geopolitik ASEAN memberikan pengaruh bagi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan geopolitik ASEAN terhadap keamanan maritim Indonesia. Keamanan maritim Indonesia menghadapi tantangan baru sebagai akibat dari perkembangan geopolitik ASEAN, termasuk munculnya berbagai ancaman di laut seperti penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan, dan overlapping klaim teritorial. Sebagai upaya untuk menangani dinamika geopolitik ASEAN, Indonesia sebagai negara yang termasuk ke dalam negara semi-periferi secara aktif terlibat dalam proyek-proyek kerja sama maritim regional seperti Forum Maritim ASEAN. Forum ini juga berfokus pada peningkatan koordinasi pengelolaan sumber daya dan keamanan laut dengan sejumlah negara semi-periferi lainnya.

Kata Kunci: Geopolitik ASEAN, Keamanan Maritim Indonesia, Teori Sistem Dunia Wallerstein.

PENDAHULUAN

Geopolitik adalah kajian tentang dinamika global dan hubungan internasional yang dipengaruhi oleh lokasi suatu negara. Geopolitik tidak hanya meliputi geografi dan politik, termasuk juga sejarah dan ekonomi yang memengaruhi dinamika politik suatu

wilayah. Rudolf Kjellen, seorang ahli geografi Swedia, pertama kali menciptakan ungkapan ini pada awal tahun 1900-an (Prakoso et al., 2024). *The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) geopolitics* saat ini banyak dipengaruhi oleh hegemoni China dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut

*Correspondence Address : evi.apriani@kn.idu.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v11i7.2024.2593-2599

© 2024UM-Tapsel Press

bersaing satu sama lain memperebutkan kekuasaan di kawasan Asia Tenggara.

Buku *The Influence of Sea Power on History 1660-1783* (1890) oleh Alfred Thayer Mahan menyoroti bagaimana kemampuan Amerika menjadi kekuatan dunia pada abad ke-20 dan kebangkitan Inggris sebagai kekuatan dunia yang bergantung pada penguasaan laut. Sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini, di mana China mengalami kebangkitan layaknya Inggris, China berusaha untuk menyaingi kekuatan Amerika Serikat dan juga berupaya untuk menguasai sebagian besar Laut China Selatan yang termasuk ke dalam wilayah ASEAN. ASEAN didirikan pada tahun 1967 sebagai hasil dari keterlibatan Asia Tenggara dalam geopolitik Perang Dingin. Sebagai tanggapan terhadap Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, badan regional ini kemudian mengadvokasi kolaborasi di bidang ekonomi, politik, dan keamanan (PSSAT, 2016).

Sebagai referensi, di dalam penelitiannya, Yoshimatsu, (2023) mengungkapkan bahwa ASEAN telah mengambil inisiatif regional dalam rangka mengatasi persaingan antarnegara menggunakan manajemen politik. Sementara SIDDÍQUE, (2022) menyatakan bahwa perdamaian global akan terancam oleh China dan Amerika Serikat lambat laun akan kehilangan posisinya dalam kepemimpinan dunia. Akibatnya, geopolitik ASEAN akan terdampak. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan geopolitik ASEAN terhadap keamanan maritim Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan dalam penulisan artikel ini. Metode penelitian kualitatif dikenal sebagai metode etnografi yang mana pendekatan ini pada awalnya sering dimanfaatkan dalam penelitian di bidang antropologi budaya.

Metode ini juga dikenal dengan teknik riset naturalistik, yang observasinya dilaksanakan pada situasi yang lebih natural (Sugiyono, 2013). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pengaruh hegemoni China – Amerika Serikat terhadap geopolitik ASEAN yang berdampak pada keamanan maritim Indonesia. Studi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui internet, artikel ilmiah, dan sumber data lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang mewadahi negara-negara di Asia Tenggara. Keberadaan ASEAN sebagai landasan regionalisme menjadi salah satu ciri utama hubungan internasional di Asia Timur dan Asia Pasifik. Organisasi ini telah mengintegrasikan negara-negara tambahan ke dalam organisasi regional yang baru dibentuk, yang telah mengintegrasikan protokol dan standar perilaku tertentu. Dengan menciptakan kerangka kerja konseptual ini, ASEAN dapat meyakinkan negara-negara lain untuk mengakui posisinya yang tepat dalam mengawasi isu-isu regional (Yoshimatsu, 2023). Isu-isu geopolitik, seperti ekspansi China dan kepentingan strategis Amerika Serikat dan India, telah berdampak pada pertumbuhan kawasan ini (Bhasin & Kumar, 2022).

The Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) adalah respon ASEAN terhadap tren geopolitik sebelumnya. "Geopolitik baru" yang dihadapi kawasan ini sekarang berbeda dengan era Perang Dingin (Acharya, 2021). Oleh karenanya, negara-negara ASEAN harus menyeimbangkan dampak dari negara-negara adidaya seperti China dan Amerika Serikat. China telah menjadi aktor utama dan mitra komersial terpenting di kawasan ini, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari lima kali lebih besar daripada ASEAN secara keseluruhan. Karena ekonominya

yang kuat dan anggaran pertahanan yang besar, ASEAN mengalami kesulitan untuk menanggapi perubahan lingkungan geopolitik secara kolektif (Acharya, 2021). Dengan demikian, untuk menjamin keseimbangan geopolitik dan kemajuan kawasan secara keseluruhan, ASEAN harus mengendalikan ketegangan-ketegangan ini (Bhasin & Kumar, 2022)

1. Dinamika Politik, Konflik, dan Kerja sama ASEAN

The ASEAN Political-Security Community (APSC) berupaya menjamin negara-negara di kawasan ini hidup berdampingan secara damai satu dengan yang lainnya dan dengan seluruh negara di dunia dalam lingkungan yang adil, demokratis, dan damai, menjadi pusat dari dinamika dan kerja sama politik ASEAN. APSC memajukan pertumbuhan politik dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi, dan supremasi hukum. Selain itu, APSC berusaha untuk menegakkan dan mempertahankan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia dalam batas-batas kewajiban dan hak-hak negara anggota ASEAN. APSC memiliki prosedur untuk mencegah terjadinya perselisihan, menyelesaikannya, dan membina perdamaian setelahnya. APSC menekankan pada penyelesaian konflik intraregional melalui cara-cara damai (The Asean Secretariat, 2024).

Wilayah perbatasan menghadirkan berbagai masalah rumit bagi APSC. Wilayah konflik sering kali menjadi titik utama bagi kerusakan politik di masa yang akan datang, permusuhan, kejahatan internasional, ketidakadilan dalam pembangunan, dan masalah keamanan non-tradisional. Berbagai kesulitan ini berdampak pada stabilitas dan keamanan perbatasan serta berpotensi memperburuk hubungan bilateral dan regional di

antara para anggota ASEAN. Kolaborasi yang kuat di antara anggota ASEAN serta strategi yang berpusat pada komunikasi, diplomasi, dan kerja sama lintas batas diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Pencapaian tujuan APSC juga sangat bergantung pada partisipasi organisasi internasional, sektor komersial, dan masyarakat sipil (Zayyan, 2024).

Meskipun Amerika Serikat sedang mengalami perselisihan dengan China, akan tetapi tidak menjadi penghalang bagi ASEAN untuk melakukan kerja sama dengannya. Dalam konteks mewujudkan Outlook ASEAN tentang Indo-Pasifik, kerja sama yang nyata sedang dilakukan. Kerja sama konkret dilakukan dalam berbagai bidang, khususnya di empat bidang utama yaitu perdagangan dan investasi, maritim, konektivitas, dan pencapaian *Sustainable Development Goal* (SDG). Upaya kerja sama berikutnya adalah memperkuat kemitraan di bidang pengembangan sumber daya manusia, *green and sustainability recovery, women, peace and security*, serta keamanan maritim. Beragam kerja sama yang dilakukan antara ASEAN - Amerika Serikat ini menjadi sebuah upaya untuk menjaga stabilitas keamanan serta perdamaian di kawasan (Kemlu RI, 2021).

2. Keamanan Maritim dalam Konsep Wallerstein

Immanuel Wallerstein adalah seorang ahli teori sistem dunia yang bertujuan untuk mendefinisikan sistem dunia kontemporer yang mencakup domain politik, budaya, dan ekonomi. Dalam teorinya, ia berpendapat bahwa karena sistem internasional saat ini didasarkan pada kerangka kerja ekonomi kapitalis, perselisihan antara negara-negara yang menentukan tatanan global dalam domain-domain ini bukanlah konflik yang nyata. Negara-

negara kuat seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan negara-negara Eropa, yang tampaknya bersaing satu sama lain, dilihat olehnya sebagai mitra dunia dari satu sistem global kontemporer. Terlepas dari semua tanda-tanda perjuangan politik yang tampak dari luar, Wallerstein menilai sistem dunia ini sebagai hasil dari kemampuan hegemonik Amerika untuk menghasilkan kebijakan alternatif dalam ideologinya sendiri (Asad, 2022).

Wallerstein menekankan landasan filosofis dan budaya sistem dunia selain landasan ekonominya. Dia menyajikan pandangan politik, sosiologis, dan historis dari sistem global secara keseluruhan. Landasan gagasan Wallerstein adalah sistematisasi hubungan dan peristiwa ekonomi, politik, dan budaya, yang dipandang tidak bergantung satu sama lain dan sebagai efek dan hasil yang bersifat lokal, melalui integrasi ke dalam kerangka besar. Hal ini pada dasarnya adalah upaya untuk mengkaraktirasi masyarakat yang besar dan kohesif yang terdiri atas sejumlah negara yang terkait dengan berbagai domain seperti politik, bisnis, dan budaya (Alamdari et al., 2021).

Dalam hal ini, konsep Wallerstein digunakan dalam konteks keamanan maritim. Keamanan maritim adalah bahasan yang rumit dan penting, terutama jika dilihat dari teori sistem dunia Wallerstein. Gagasan ini menyatakan bahwa dunia terbagi menjadi tiga wilayah: inti, semi-periferi, dan periferi. Setiap wilayah memiliki fungsi dan hubungan ekonomi yang unik. Negara-negara di pusat keamanan maritim cenderung memiliki lebih banyak kekuatan laut dan lebih banyak pengaruh terhadap penciptaan norma dan kebijakan internasional yang berkaitan dengan keamanan maritim. Teori sistem dunia yang dikembangkan oleh Wallerstein menyajikan kerangka kerja yang dapat membantu untuk

melihat fenomena kekuatan global dan dampaknya terhadap peraturan keamanan maritim di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Keamanan maritim tidak hanya mencakup pertahanan wilayah maritim, tetapi juga mencakup cara-cara di mana berbagai negara berkolaborasi dan berkomunikasi dalam jaringan global.

- **Negara-Negara Inti**

Negara-negara inti yang mendominasi secara ekonomi memiliki angkatan bersenjata yang kuat, teknologi mutakhir, dan pengaruh yang signifikan terhadap perdagangan dan perekonomian internasional. Negara-negara ini secara historis menguasai jalur pelayaran utama dan memiliki angkatan laut yang kuat untuk melindungi kepentingan mereka. Amerika Serikat, Inggris, dan China adalah beberapa negara inti yang memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan secara global dan melindungi rute perdagangan maritim. Beberapa negara tersebut terus meningkatkan investasi pada kekuatan angkatan laut mereka, untuk mengembangkan sektor maritimnya. Bahkan, Amerika Serikat dan China bersaing secara ketat antara satu dan yang lainnya untuk dapat mencapai tujuan negara masing-masing. Selain negara-negara inti maritim, terdapat juga titik-titik penting dalam sektor maritim. Beberapa kegiatan yang terjadi secara langsung di wilayah maritim melibatkan beberapa titik penting, di antaranya Terusan Suez, Selat Malaka, dan Selat Hormuz. *Chokepoints* tersebut menjadi jalur penting dalam perdagangan internasional dan pasokan energi. Dengan demikian, beberapa titik penting maritim tersebut dikelola dan diawasi secara ketat untuk menjaga kestabilan dalam berbagai kepentingan.

- **Negara-Negara Semi-Periferi**

Negara-negara yang memiliki kekuatan maritim tidak sebesar negara inti termasuk ke dalam negara semi-periferi. Industrialisasi dan pembangunan ekonomi mereka berada pada tingkat sedang. Negara-negara semi-periferi ASEAN menjadi lebih berkembang secara ekonomi dan berupaya memperkuat kapasitas kelautan mereka. Beberapa negara ASEAN yang termasuk ke dalam negara semi-periferi adalah Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Untuk mempertahankan laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka dari berbagai ancaman, termasuk pembajakan, penyelundupan, dan pelanggaran perbatasan oleh kapal-kapal asing, negara-negara ini berusaha untuk meningkatkan kekuatan angkatan laut mereka. Membangun pelabuhan, jalur pelayaran, dan fasilitas logistik adalah investasi yang mereka lakukan untuk meningkatkan perdagangan global dan meningkatkan konektivitas laut. Selain itu, untuk meningkatkan koordinasi keamanan dan pengelolaan sumber daya laut, mereka juga secara aktif berpartisipasi dalam inisiatif kerja sama maritim regional seperti Forum Maritim ASEAN.

- **Negara-Negara Periferi**

Negara-negara ASEAN yang diklasifikasikan sebagai negara periferi memiliki ekonomi yang belum berkembang dan kemampuan kelautan yang terbatas. Myanmar dan Kamboja termasuk ke dalam negara periferi. Selain itu, Laos juga termasuk di dalamnya. Terlepas dari kenyataan bahwa Laos tidak memiliki laut, kebijakan maritim regional tetap penting bagi ekonomi dan keamanan kawasan ini. Negara-negara periferi sering kali kesulitan untuk memantau dan menegakkan peraturan di laut teritorial

mereka, terutama yang berkaitan dengan penangkapan ikan ilegal dan penyelundupan, karena sumber daya yang tidak memadai. Oleh karenanya, mereka cukup banyak bergantung dan melakukan berbagai kerja sama dengan negara-negara yang lebih maju dalam hal peralatan untuk meningkatkan kapasitas maritim.

3. Pengaruh Geopolitik ASEAN terhadap Keamanan Maritim Indonesia ASEAN

Berdasarkan *Wallerstein's World-System Theory*, dalam konteks ASEAN, Indonesia dapat dianggap sebagai negara semi-periferal yang berupaya menjaga keamanan maritimnya dari kepentingan yang saling bertentangan dengan kekuatan-kekuatan inti di luar kawasan, seperti China dan Amerika Serikat. Rencana keamanan maritim Indonesia dipengaruhi oleh dinamika geopolitik ASEAN, termasuk sengketa Laut China Selatan dan kehadiran kekuatan eksternal. Mengingat lokasinya yang strategis di sepanjang rute laut yang penting, peran Indonesia sebagai negara kepulauan membuat pertahanan maritim yang kuat sangat krusial untuk menjaga kepentingan ekonomi dan kedaulatannya (Inayati, 2022). Dengan demikian, sedikit banyaknya Indonesia akan terus terdampak oleh perkembangan geopolitik ASEAN.

4. Strategi Negara-Negara ASEAN

Mengingat beberapa negara ASEAN termasuk ke dalam negara semi-periferi dan periferi, maka negara-negara ini perlu melakukan berbagai strategi sebagai langkah untuk meningkatkan kapabilitas dan keamanan maritim. Berikut terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Meningkatkan kerja sama regional melalui berbagai kegiatan seperti *East Asia Summit Maritime Cooperation*. Hal ini bertujuan untuk menangani berbagai tantangan maritim dan saling berbagi informasi dan pengetahuan kemaritiman.
2. Membangun kerja sama melalui pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas yang bertujuan pada penegakan hukum maritim, pengelolaan sumber daya maritim, pelestarian ekosistem laut, manajemen bencana maritim, kekuatan militer, dan bidang lainnya.
3. Mendorong investasi dalam peningkatkan infrastruktur dan teknologi maritim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan perdamaian kawasan.
4. Membangun kebijakan maritim yang berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat pesisir dan melindungi keberlangsungan eksistensi laut.

SIMPULAN

Studi tentang hubungan internasional dan dinamika global yang berkaitan dengan posisi geografis suatu negara dikenal sebagai geopolitik. Kehidupan suatu negara secara signifikan dipengaruhi oleh geopolitik, baik dalam hubungan antarnegara maupun interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan. Keamanan maritim suatu negara dipengaruhi oleh geopolitik regional baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia juga terkena dampak dari masalah geopolitik ini. Perkembangan geopolitik ASEAN

tersebut membawa tantangan tersendiri bagi keamanan maritim Indonesia, yaitu munculnya berbagai ancaman maritim, seperti penyelundupan, *illegal fishing*, tumpang tindihnya klaim teritorial, dan berbagai ancaman lainnya. Persaingan antara China dan Amerika Serikat adalah salah satu masalah geopolitik yang semakin intens dan mempengaruhi ASEAN. Pemeliharaan hubungan diplomatik yang baik menjadi sangat penting bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menjaga stabilitas perdamaian.

Salah satu inisiatif untuk menyelesaikan beberapa konflik yang muncul baik secara intraregional maupun regional, termasuk persaingan Amerika Serikat - China, adalah dengan membentuk APSC sebagai *platform* untuk resolusi konflik. Dalam upaya untuk menjaga keseimbangan geopolitik regional, negara-negara ASEAN berupaya untuk mengurangi dampak konflik dan mengelola ketegangan yang meningkat. Anggota ASEAN dan Amerika Serikat melaksanakan sejumlah program kerja sama. Untuk mengatasi hal ini, empat kerja sama yang sedang berlangsung yaitu perdagangan dan investasi, maritim, konektivitas, dan pencapaian SDGs. Mengingat Amerika Serikat adalah negara yang kuat dan menjadi salah satu anggota negara inti, kerja sama ini harus terus dilanjutkan untuk menjaga stabilitas regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2021). *ASEAN and the new geopolitics of the Indo-Pacific*. EastAsiaForum. <https://eastasiaforum.org/2021/12/29/asean-and-the-new-geopolitics-of-the-indo-pacific/>
- Alamdari, S. E., Shafiee, N., & Motaghi, E. (2021). Theoretical Analysis of Chaos Management Model in Global Geopolitics. *International Quarterly of Geopolitics*, 1392, 203–228.
- Asad, Z. (2022). Immanuel Wallerstein's Theory of the World System,

Geopolitics and Geoculture. *ENDLESS: International Journal of Future Studies*, 5(2), 157–169.
<https://doi.org/10.54783/endlessjournal.v5i2.85>

Bhasin, S., & Kumar, B. (2022). ASEAN—The Geopolitical Factors and Its Impact on Growth of the Region. *Cultural Entrepreneurship*. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2771-3_6

Inayati, R. S. (2022). ASEAN Maritime Cooperation in Politics and Security. *ASEAN Maritime Security*. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2362-3_3

Kemlu RI. (2021). *Indonesia menjadi koordinator ASEAN-US Dialogue Partnership 2021-2024*. Kementerian Luar Negeri RI. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2772/view/indonesia-menjadi-koordinator-asean-us-dialogue-partnership-2021-2024>

Prakoso, L. Y., Soemantri, A. I., Purwantoro, S. A., Adriyanto, A., Widodo, P., Yulivan, I., Pramono, B., Prasetyo, H., & Mahardika, S. (2024). *Geopolitik Dalam Konteks Keamanan Maritim* (G. E. Saputro & S. Arismunandar (eds.); 1st ed.). Widina Media Utama.

PSSAT. (2016). *Mengenal Asia Tenggara*. Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM. <https://pssat.ugm.ac.id/id/mengenal-asia-tenggara/>

SİDDİQUE, H. A. (2022). Understanding the US and China Rivalry through Modelski's Model & Offensive Realism Theory (The Past, Present & Future). *International Journal of Politics and Security*, 4(3), 271–298. <https://doi.org/10.53451/ijps.1094852>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Penerbit Alfabeta Bandung.

The Asean Secretariat. (2024). *ASEAN Political Security Community*. ASEAN. <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/>

Yoshimatsu, H. (2023). ASEAN and Great Power Rivalry in Regionalism: From East Asia to the Indo-Pacific. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 25–44. <https://doi.org/10.1177/18681034221139297>

Zayyan, N. (2024). *Challenges of the ASEAN Political-Security Community*. ModernDiplomacy. <https://moderndiplomacy.eu/2023/07/04/challenges-of-the-asean-political-security-community/>